

*Received : 22 Okt 2024**Accepted : 22 Okt 2024**Published : 22 Okt 2024*

KINERJA PEMERINTAH DAERAH DALAM MEWUJUDKAN GOOD GOVERNANCE DI KABUPATEN BANDUNG BARAT

Slamet Riyanto¹Agus Subagyo²Atik Rochaeni³*1,2,3) Program Studi Magister Ilmu Pemerintahan Fisip Unjani*

Email Korespondensi : slametlia31@gmail.com

Abstrak

Hasil kinerja Pemerintah Kabupaten Bandung Barat secara umum baik. Namun, jika dilihat dari aspek tata kelola yang baik, hal ini belum optimal, sehingga upaya nyata masih diperlukan untuk meningkatkan kinerja organisasi pemerintah daerah Kabupaten Bandung Barat guna mencapai tata kelola yang baik. Hambatan yang dihadapi dalam kinerja organisasi adalah terbatasnya kualitas dan kuantitas sumber daya aparatur serta sarana dan prasarana. Upaya yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Bandung Barat untuk mengatasi hambatan yang dihadapi adalah dengan meningkatkan kemampuan aparat dan mendorong peningkatan partisipasi masyarakat untuk memantau kinerja organisasi pemerintah daerah Kabupaten Bandung Barat.

Kata Kunci : Kinerja, Pemerintah, Penyelenggara Pemerintahan yang Baik, Bandung Barat

Abstract

The results of the performance of the West Bandung Regency Government is generally good. However, if viewed from the aspect of good governance, this is not yet optimal, so real efforts are still needed to improve the performance of the West Bandung Regency regional government organization in order to achieve good governance. The obstacles faced in organizational performance are the limited quality and quantity of apparatus resources and facilities and infrastructure. Efforts carried out by the West Bandung Regency government to overcome the obstacles faced are by increasing the capabilities of the apparatus and encouraging increased community participation to monitor the performance of West Bandung Regency regional

*Received : 22 Okt 2024**Accepted : 22 Okt 2024**Published : 22 Okt 2024*

*government organizations.****Keywords: Performance, Government, Good Governance, West Bandung*****PENDAHULUAN**

Kinerja organisasi pada hakikatnya menjadi suatu hal yang penting dalam organisasi. Hal itu oleh karena kinerja yang baik seyogyanya akan membawa dampak yang baik bagi organisasi terutama dalam pencapaian tujuan yang diinginkan. Organisasi yang berkinerja tinggi pada dasarnya akan selalu dan selalu meningkatkan produktivitas maupun kualitas yang dihasilkan organisasi.

Hal yang perlu untuk dipahami bahwa kinerja organisasi tidak terlepas dari organisasinya itu sendiri sebagai pelaksana segala kegiatan di dalam mencapai tujuan organisasi. Dalam hal ini, pemerintah daerah merupakan salah satu organisasi, yakni organisasi pemerintah di sektor publik, yang setidaknya berhubungan langsung, dan tidak berjauhan dengan masyarakat di daerah. Dijelaskan dalam Pasal 1 Ayat (3), UU No.23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah bahwa pemerintah daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

Berdasarkan hal itu, dapat dimaknai pula bahwa pemerintah daerah beserta organisasi pemerintah daerahnya memiliki peran yang begitu sangat penting di daerah. Sehingga dengan hal itu pula tidak diragukan lagi dan menjadi sangat jelas bahwa kinerja pemerintah daerah melalui organisasi pemerintah daerahnya menjadi sorotan penting, bahwa di dalam menyelenggarakan Pemerintahan Daerah, Kepala Daerah perlu dibantu oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang dapat menyelenggarakan seluruh urusan Pemerintah yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah baik itu Pemerintah Daerah tingkat Kabupaten/Kota maupun Provinsi.

Maka dari itu, kinerja pemerintah daerah sangat penting dan menjadi amat yang cukup sangat strategis dalam mendukung terlaksananya otonomi daerah yang

*Received : 22 Okt 2024**Accepted : 22 Okt 2024**Published : 22 Okt 2024*

baik, yang dapat mendukung misi dan visi pembangunan daerah, bahkan juga dapat menjadi parameter keberhasilan di dalam mewujudkan pemerintahan yang baik (*good governance*) yang menjadi agenda pemerintah pusat sekarang ini. Salah satu pemerintah daerah yang tengah memperbaiki tata pemerintahan yang baik diantaranya ialah Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat. Hal itu tertuang di dalam visi dan misi Pemerintah Kabupaten Bandung Barat yaitu untuk, “Mewujudkan visi Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat melalui misinya yakni, mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), bersih, aspiratif, dan inovatif dan melayani masyarakat melalui basis pengembangan teknologi informasi.”

Berdasarkan visi dan misi tersebut dapat diketahui bahwa secara eksplisit visi dan misi yang disusun Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat bertujuan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) dan juga untuk mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas, melalui prinsip *good governance* yang dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000, yakni, profesionalitas, akuntabilitas, transparansi, pelayanan prima, demokrasi dan partisipasi, efisiensi dan efektivitas, serta supremasi hukum. Sasaran dari visi dan misi tersebut sendiri yakni, *pertama*, meningkatkan akuntabilitas instansi pemerintah, *kedua*, prosentase urusan pemerintahan yang difasilitasi dan dikoordinasikan dan *ketiga*, meningkatkan kualitas pelayanan publik.

METODE PENELITIAN

Penelitian pada hakekatnya merupakan suatu upaya untuk menemukan sesuatu yang baru dan menemukan suatu kebenaran dari objek yang diteliti atau dapat juga dikatakan sebagai cara untuk memahami suatu kondisi keadaan (objek) yang tengah diamati (Moleong, 2014, hal. 49). Lebih dari itu, penelitian merupakan cara kerja ilmiah yang bertujuan untuk menemukan, membuktikan, dan mengembangkan ilmu

*Received : 22 Okt 2024**Accepted : 22 Okt 2024**Published : 22 Okt 2024*

pengetahuan. Cara ilmiah di sini dimaksudkan pada suatu cara yang didasarkan pada ciri-ciri keilmuan, yaitu: rasional, empiris dan sistematis (Hamzah, 2019, hal. 7). Maka dari itu, jelas penelitian membutuhkan proses dan proses tersebut memiliki cara atau ketentuan-ketentuan/kaidah- kaidah/metode-metode yang berbeda-beda menurut klasifikasinya ataupun dapat berdasarkan dari kebutuhan penelitian itu sendiri.

Dalam hal ini, guna menemukan, membuktikan dan kemungkinan mengembangkan suatu model sebagai solusi dari satu atau lebih persoalan maupun berdasarkan fenomena yang ada, peneliti menggunakan metode penelitian deskriptif (to describe) kualitatif melalui pendekatan grounded theory. Yang dalam hal ini merupakan salah satu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa ucapan dan tulisan dan perilaku orang- orang yang diamati dalam suatu konteks tertentu yang dikaji dari sudut pandang yang utuh, komprehensif dan holistik (Hamzah, 2019, hal. 35).

Menggunakan metode penelitian kualitatif melalui pendekatan grounded theory atas dasar pertimbangan, bahwa penelitian dengan metode kualitatif memiliki jangkauan yang sangat luas dan fleksibel dalam berbagai disiplin ilmu, terlebih lagi grounded theory digunakan peneliti dengan tujuan untuk menemukan kemungkinan persoalan baru terkait penelitian yang telah dijelaskan sedari awal mengenai kinerja dan fungsionalisasi organisasi. Hal ini senada dengan apa yang dikatakan Strauss & Corbin, bahwa penelitian kualitatif biasanya digunakan untuk meneliti fenomena misalnya seperti, kehidupan masyarakat, sejarah, tingkah laku, fungsionalisasi organisasi, gerakan sosial, keagamaan, atau hubungan kekerabatan (Ghony & Almanshur, 2012).

Melalui metode penelitian kualitatif dalam hal ini menggunakan metode penarikan kesimpulan sebagai asumsi yang bersifat induktif sebagaimana metode penelitian kualitatif bekerja. Maksudnya, dalam proses penelitian peneliti membiarkan gejala dan permasalahan-permasalahan muncul dari data atau dibiarkan terbuka untuk

*Received : 22 Okt 2024**Accepted : 22 Okt 2024**Published : 22 Okt 2024*

kemudian di interpretasi dan disimpulkan secara umum dan membentuk suatu konstruk teori (konsep). Sebagaimana Ghony & Almansur (2012, hal. 14) menjelaskan bahwa penelitian kualitatif merupakan salah satu metode penelitian yang bertujuan mendapatkan pemahaman tentang kenyataan melalui proses berfikir induktif.

KERANGKA PEMIKIRAN

Dalam perihal kinerja pemerintah daerah dalam mewujudkan good governance di Kabupaten Bandung Barat, penulis berupaya menggunakan pendekatan teoritis mengenai kajian kinerja organisasi pemerintah/publik, Beberapa hal yang menjadi pertimbangan dalam kajian dasar teoritis ini berusaha di jelaskan di sini, yakni, mengenai model pengukuran kinerja organisasi, gejala dan permasalahan yang membangun dasar-dasar teoritis, dan penentuan kerangka teoritis.

Dalam karakteristik mengenai model pengukuran kinerja organisasi, peneliti meninjau ulang kembali secara analitik dan komparatif mengenai penggunaan model atau konsep teoritis mengenai kinerja organisasi/pemerintah/publik, yang mana dalam analisis peneliti banyak para peneliti terdahulu menggunakan model konsep teoritis mengenai kinerja organisasi yang justru sedikit keliru di dalam menggunakan model konsep teoritis mengenai bagaimana cara untuk mengetahui suatu kinerja organisasi pemerintah/publik.

Kondisi tersebut memang dapat dimaklum oleh karena cara untuk meninjau kinerja organisasi memang begitu sangat rumit dan begitu beragam metodenya. Akan tetapi perlu dipahami bahwa untuk mengetahui bagaimana hasil kinerja organisasi sektor publik/pemerintah model penggunaan konsep teoritis yang digunakan jangan sampai menimbulkan suatu pemahaman yang keliru.

Penggunaan pendekatan model pengukuran yang cenderung bersifat prosedural dan metodis yang digunakan untuk meninjau hasil kerja organisasi perlu dibedakan dengan pendekatan teoritis yang bersifat deskriptif secara alamiah. Mengingat hal

*Received : 22 Okt 2024**Accepted : 22 Okt 2024**Published : 22 Okt 2024*

tersebut memiliki perbedaan konseptual yang cukup signifikan.

Selanjutnya hal yang perlu untuk diperhatikan kembali adalah pembedaan antara pengukuran dan penilaian yang secara konseptual hal tersebut memiliki perbedaan yang cukup signifikan. Terkadang, pemaknaan mengenai pengukuran dan penilaian menjadi bias dan cenderung disama artikan. Bahwa, pengukuran sebagai proses dan tindakan menggunakan tools/metode dilakukan untuk mengetahui hasil, baik itu hasil yang semestinya dicapai oleh suatu organisasi maupun mengetahui hasil yang dilakukan sebagai proses evaluatif berdasarkan kebutuhan suatu penelitian. Sedangkan penilaian sebagai proses menilai baik dan buruk nya suatu kinerja organisasi oleh karena standar penilaian yang telah ditetapkan sebelumnya.

PEMBAHASAN

Kinerja Pemerintah Kabupaten Bandung Barat Dalam Mewujudkan *Good Governance*

Good governance adalah konsep yang mengacu pada proses pencapaian keputusan dan pelaksanaannya yang dapat dipertanggungjawabkan secara bersama. Konsep ini merupakan konsensus yang dicapai oleh pemerintah, warga negara, dan sektor swasta bagi penyelenggaraan pemerintahan dalam suatu negara. Penerapan prinsip-prinsip *good governance* sangat diyakini memberikan kontribusi yang strategis dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat, menciptakan iklim bisnis yang sehat, meningkatkan kemampuan daya saing, serta sangat efektif mencegah penyimpangan dan korupsi. Pemerintah memegang peran utama dalam mewujudkan *good governance* dalam pelaksanaan anggaran belanja pemerintah daerah. Setelah APBD disetujui dan ditetapkan menjadi Peraturan Daerah APBD maka tahapan penting selanjutnya adalah pelaksanaan anggaran.

Pemerintah harus menerapkan prinsip-prinsip *good governance* dalam melaksanakan anggaran sehingga mendorong terciptanya kesejahteraan rakyat. Lebih

*Received : 22 Okt 2024**Accepted : 22 Okt 2024**Published : 22 Okt 2024*

lanjut diuraikan oleh Mas Achmad Daniri bahwa dalam penerapan *good governance* harus tercermin tiga karakteristik. Pertama, praktek *good governance* harus memberi ruang kepada pihak di luar penyelenggara pemerintah untuk berperan optimal sehingga memungkinkan adanya sinergi antar berbagai pihak. Kedua, terkandung nilai-nilai dalam praktek *good governance* yang membuat penyelenggara negara maupun swasta dan dapat bekerja lebih efektif dalam mewujudkan kesejahteraan rakyat. Ketiga, praktek *good governance* adalah praktek bernegara yang bersih dan bebas dari korupsi serta berorientasi pada kepentingan publik.

Pemerintah belum memiliki peraturan yang mengatur secara khusus tentang pedoman penerapan *good governance*. Prinsip-prinsip *good governance* tersebar dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG) pada tahun 2010 telah menerbitkan pedoman umum *good public governance*. Penerapan *Good Governance* dalam Pengelolaan Keuangan Daerah. Perkembangan paradigma masyarakat modern untuk mewujudkan *good governance* atau sistem pemerintahan yang baik menuntut pembaharuan terhadap sistem pemerintahan. Sistem pemerintahan dijalankan berdasarkan prinsip profesionalitas, akuntabilitas, transparansi, pelayanan prima, demokrasi, efisiensi, efektivitas, supremasi hukum dan dapat diterima oleh seluruh Masyarakat (Undang-Undang Nomor 101 Tahun 2000).

Implementasi *good governance* dalam pengelolaan keuangan daerah tercermin dalam Pasal 283 UU No. 23 Tahun 2014 dan Pasal 3 PP No. 12 Tahun 2019. Pengelolaan Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat.

Pengelolaan Keuangan Daerah dilakukan secara tertib artinya sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan dan didukung dengan bukti administrasi sah, sebagai contoh Rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (RPPAS) harus disampaikan Kepala Daerah kepada DPRD

*Received : 22 Okt 2024**Accepted : 22 Okt 2024**Published : 22 Okt 2024*

paling lambat minggu kedua bulan Juli (Pasal 90 PP 12 Tahun 2019). Penatausahaan APBD baik penerimaan maupun pengeluaran disertai dengan bukti yang sah (Pasal 137, PP No. 12 Tahun 2019) (Pasal 141 PP No. 12 Tahun 2019). Pengelolaan keuangan Daerah mengacu pada prinsip value for money yaitu ekonomis, efisien dan efektif. Ekonomis artinya pengeluaran atau biaya terendah untuk biaya masukan dengan kualitas tertentu.

Efisien artinya pencapaian keluaran yang maksimum dengan masukan tertentu atau penggunaan masukan terendah untuk mencapai keluaran tertentu. Efektif artinya pencapaian hasil program dengan sasaran yang telah ditetapkan, yaitu dengan cara membandingkan keluaran dengan hasil. Transparan atau keterbukaan artinya memungkinkan masyarakat mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang Keuangan Daerah, sehingga Pemerintah Daerah menyediakan sistem informasi keuangan daerah. Bertanggung jawab, satuan kerja wajib mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepadanya.

Keadilan dan Kepatutan, Distribusi kewenangan dan pendanaan yang seimbang dan tindakan yang dilakukan dengan wajar dan proporsional. Manfaat untuk Masyarakat, diutamakan untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat baik bidang Pendidikan, Kesehatan, Pekerjaan umum, sosial dan lainnya. Taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku baik dalam bentuk Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Menteri, Peraturan daerah serta ketentuan teknis lainnya.

a. Dimensi Kepuasan Masyarakat di Daerah

Dimensi ini memberikan perhatian pada nilai kepuasan masyarakat yang dilakukan berdasarkan penilaian tertentu. Dalam proses ini penilaian dan hasil penilaian dapat memberikan *feed back* agar suatu organisasi menjadi lebih baik di

*Received : 22 Okt 2024**Accepted : 22 Okt 2024**Published : 22 Okt 2024*

dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Salah satu tugas utama pemerintah adalah pelayanan umum (public service), selain tugas pembangunan (development) dan pemberdayaan masyarakat (empowerment). Meski demikian, sering kali layanan publik dikeluhkan warga karena tidak memenuhi ekspektasi dan kepuasan pengguna layanan.

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhannya. Mengingat fungsi utama pemerintah adalah melayani masyarakat maka pemerintah perlu terus berupaya meningkatkan kualitas pelayanan. Ukuran keberhasilan penyelenggaraan pelayanan ditentukan oleh tingkat kepuasan penerima pelayanan. Kepuasan penerima pelayanan dicapai apabila penerima pelayanan memperoleh pelayanan sesuai dengan yang dibutuhkan dan diharapkan.

Pada dasarnya pelaksanaan survey IKM sudah ditetapkan di dalam Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara No. 14 tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan IKM Unit Pelayanan Instansi Pemerintah. Yang merupakan salah satu alat ukur untuk mengetahui tingkat kepuasan masyarakat terhadap suatu layanan. Angka indeks yang didapatkan merupakan angka persepsi masyarakat terhadap layanan dari pemerintah yang mengukur tingkat kualitas pelayanan. Kategori jawaban terdiri dari empat tingkat dari tingkat kurang baik diberi nilai 1 (satu) sampai dengan tingkat sangat baik dan diberi nilai 4 (empat).

Kegiatan penyusunan IKM dimaksudkan untuk mendapatkan data tingkat kepuasan masyarakat melalui survei kepada masyarakat terhadap pelayanan publik yang dilakukan oleh unit penyelenggara pelayanan Pemerintah di wilayah. Tujuannya untuk mendapatkan feedback secara berkala atas kinerja/kualitas

*Received : 22 Okt 2024**Accepted : 22 Okt 2024**Published : 22 Okt 2024*

pelayanan yang diberikan pemerintah kepada masyarakat sebagai bahan untuk menetapkan kebijakan dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik yang selanjutnya dilakukan secara berkesinambungan.

b. Dimensi Operasi Kegiatan

Dimensi ini menitik beratkan pada sejauh mana informasi mengenai operasional kegiatan secara internal dapat seirama dan secara keseluruhan berfokus pada upaya pencapaian misi dan visi organisasi yang tercantum di dalam dokumen perencanaan organisasi pemerintah. Melalui dimensi ini, maka dapat diidentifikasi kegiatan mana yang menambah nilai pelayanan dan kegiatan mana yang tidak menambah nilai produk/pelayanan. Dengan mengurangi kegiatan-kegiatan yang tidak menambah nilai produk/pelayanan maka keseluruhan biaya dapat dihemat dengan baik, karena setiap rupiah yang dikeluarkan dapat diukur tingkat efektivitasnya (*cost effectiveness*). Seperti yang kita ketahui bahwa terdapat beberapa dokumen perencanaan sebagai pedoman bagi organisasi perangkat daerah (OPD) dalam melaksanakan tugas fungsinya dalam mewujudkan visi misi organisasi.

Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja OPD), adalah dokumen perencanaan kerja OPD dalam satu tahun anggaran. Renja OPD disusun berdasarkan kewenangan, tugas pokok, dan fungsi OPD, serta mengacu pada Rencana Strategis (Renstra), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD). Renstra Perangkat Daerah. Adalah dokumen perencanaan OPD untuk periode lima tahun. Renstra OPD memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan selama lima tahun, yang mengacu pada tugas pokok dan fungsinya.

Rencana Kinerja Tahunan (RKT). Adalah dokumen yang memuat informasi tentang sasaran yang ingin dicapai dalam tahun yang bersangkutan, indikator kinerja sasaran, dan rencana capaian, program, kegiatan, serta kelompok indikator kinerja dan rencana capaiannya.

*Received : 22 Okt 2024**Accepted : 22 Okt 2024**Published : 22 Okt 2024*

c. Dimensi Kepuasan para Pegawai Aparatur

Dimensi ini selain diukur dari kuantitas dan kualitas pegawai juga diukur dari sejauh mana para pegawai aparatur dijamin segala bentuk kesejahteraannya yang sesuai dengan kinerjanya.

Kepuasan kerja merupakan faktor yang dipandang penting dalam organisasi. Robbins (1991:163) menyatakan bahwa seseorang dengan kepuasan kerja yang tinggi akan memiliki sikap positif terhadap pekerjaannya. Bahkan, pandangan klasik menyatakan bahwa karyawan yang bahagia adalah karyawan yang produktif (Robbins, 1991:174). Locke dalam Setiawan dan Ghozali (2006:158) mendefinisikan kepuasan kerja sebagai “.. kondisi menyenangkan atau secara emosional positif yang berasal dari seseorang atas pekerjaannya atau pengalaman kerjanya.” Terdapat beberapa variasi mengenai dimensi-dimensi kepuasan kerja.

Perbedaan tersebut tidak terlalu jauh berbeda, dan perbedaan bisa berbentuk perbedaan penamaan atau penambahan dimensi. Setiawan dan Ghozali (2006:161) mengutip pandangan Smith et al. (1969) bahwa kepuasan kerja terdiri atas lima aspek yaitu “pekerjaan itu sendiri, gaji, promosi, supervisi, dan rekan kerja.”

d. Dimensi Kepuasan para Pemangku Kepentingan

Dimensi ini lebih menekankan kepada bagaimana kinerja pemerintah di desain dan disusun berdasarkan kebutuhan para pemangku kepentingan. Kepuasan pemangku kepentingan adalah tingkat kepuasan orang-orang atau kelompok yang secara positif atau negatif terkena dampak suatu proyek, inisiatif, kebijakan, atau organisasi. Pemangku kepentingan dapat internal atau eksternal, dan mereka memiliki tingkat kepentingan atau pengaruh yang berbeda-beda dalam aktivitas dan hasil suatu organisasi. Untuk mencapai kepuasan pemangku kepentingan, organisasi dapat membangun hubungan yang kuat Melalui komunikasi yang

*Received : 22 Okt 2024**Accepted : 22 Okt 2024**Published : 22 Okt 2024*

terbuka dan transparan, organisasi dapat membangun kepercayaan dan melibatkan pemangku kepentingan dalam proses pengambilan keputusan.

Memahami keinginan dan kebutuhan Organisasi dapat mengenali keinginan dan kebutuhan pemangku kepentingan untuk menyediakan pelayanan yang unggul. Keterlibatan pemangku kepentingan dapat membantu organisasi mencapai hasil yang lebih baik, seperti pendidikan, koneksi, keterlibatan, atau keuntungan.

Pada dimensi ini organisasi perangkat daerah yang menjadi ujung tombak pelaksanaan pemerintah daerah dalam pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat sebagai perwujudan pelaksanaan pemerintahan yang baik perlu mendapatkan dukungan pemangku kepentingan dalam hal ini Bupati sebagai pimpinan daerah serta Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana kita ketahui memiliki fungsi dalam pengalokasian Anggaran bagi pemerintah khususnya yang berkaitan langsung dengan penerapan pelaksanaan kegiatan dalam perencanaan kegiatan pemerintah dalam kurun waktu tertentu.

e. Dimensi Waktu

Informasi kinerja yang benar atau valid dan lengkap akan kehilangan maknanya jika disampaikan tidak tepat waktu. Ketepatan waktu penyampaian menjadi penting oleh karena informasi tersebut merupakan bahan bagi semua pihak yang memerlukan informasi dalam pengambilan suatu keputusan. Sektor pelayanan publik nampaknya masih sangat lekat dengan berbagai konotasi negatif, salah satunya adalah terkait dengan pemberian layanan yang belum dengan cepat dilakukan. Kinerja birokrasi yang lamban, bertele-tele dan serba terbatas kerap pula diasosiasikan dengan salah satu bentuk patologi birokrasi, senyatanya kondisi yang demikian serta penanggulangannya tidak hanya menjadi perhatian di Indonesia, pada beberapa negara diketahui juga terjadi hal serupa. Oleh karenanya pembatasan waktu terhadap hal tersebut dilakukan baik melalui

*Received : 22 Okt 2024**Accepted : 22 Okt 2024**Published : 22 Okt 2024*

rumusan peraturan perundang-undangan maupun putusan lembaga peradilan.

Dalam konteks ini di Indonesia sendiri, penundaan terhadap pemberian layanan publik diatur sebagai salah satu bentuk Maladministrasi. Pasal 11 Peraturan Ombudsman Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penerimaan, Pemeriksaan, dan Penyelesaian Laporan mengatur bahwa salah satu bentuk Maladministrasi adalah penundaan berlarut, yaitu perbuatan mengulur waktu penyelesaian layanan atau memberikan layanan melebihi baku mutu waktu dari janji layanan. Sedangkan yang dimaksud dengan Maladministrasi, sesuai dengan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia, adalah perilaku atau perbuatan melawan hukum, melampaui wewenang, menggunakan wewenang untuk tujuan lain dari yang menjadi tujuan wewenang tersebut, termasuk kelalaian atau pengabaian kewajiban hukum dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang dilakukan oleh Penyelenggara Negara dan pemerintahan yang menimbulkan kerugian materiil dan/atau immateriil bagi masyarakat dan orang perseorangan.

Faktor-faktor yang menghambat dalam kinerja Pemerintah Kabupaten Bandung Barat dalam mewujudkan *Good Governance*

Keberhasilan penyelenggaraan otonomi daerah tidak terlepas adanya partisipasi aktif anggota masyarakatnya. Salah satu wujud dari tanggung jawab masyarakat. Masyarakat daerah, baik kesatuan sistem maupun sebagai individu, merupakan integral yang sangat dari sistem pemerintahan daerah, karena secara prinsip penyelenggaraan otonomi daerah ditujukan guna mewujudkan masyarakat yang sejahtera di daerah yang bersangkutan. Tentu bukan pekerjaan yang mudah untuk mewujudkan ketiga prinsip good governance yaitu partisipasi, transparansi dan akuntabilitas dalam praktik pemerintahan.

Kinerja organisasi pemerintah daerah di Kabupaten Bandung Barat masih

*Received : 22 Okt 2024**Accepted : 22 Okt 2024**Published : 22 Okt 2024*

menemui faktor-faktor yang menghambat jalannya. Adapun faktor-faktor tersebut adalah *pertama* Jumlah aparatur yang terbatas, kedisiplinan pegawai dan kecakapan aparatur hal ini menyebabkan terbatasnya penyelenggaraan good governance dalam mengatasi atau melakukan pelayanan publik pada organisasi perangkat daerah yang akhirnya terdinya keterlambatan waktu yang cukup banyak yang pada akhirnya menyebabkan ketidakpuasan terhadap pelayanan yang diberikan oleh pemerintah Kabupaten Bandung Barat.

Kedua, Kurangnya dukungan pemangku kepentingan di Bandung Barat, kurangnya dukungan baik dari segi kebijakan maupun dari segi anggaran juga merupakan faktor penghambat dalam pelaksanaan good governance di Kabupaten Bandung Barat, hal ini penting bagi organisasi pemerintah sebagai pelaksana dalam pengelolaan pembangunan di wilayah Kabupaten Bandung Barat.

Ketiga adalah kurangnya partisipasi masyarakat. Kinerja Pemerintah Kabupaten Bandung Barat yang belum optimal masih dihadapkan pada rendahnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah. Kemajuan daerah kabupaten Bandung Barat membawa dampak negatif salah satunya menurunnya partisipasi masyarakat terhadap pembangunan di daerah. Hal ini menjadikan tantangan bagi pemerintahan daerah kabupaten Bandung Barat Dalam meningkatkan kinerjanya Keempat, mekanisme penjangkauan aspirasi masyarakat yang tidak merata, biasanya yang diundang dalam jaring aspirasi bersifat elitis, kurangnya kesadaran masyarakat terhadap partisipasi mereka terhadap pembuatan kebijakan atau program-program Kemudian dalam penerapan transparansi, pemerintah kurang memberikan informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat sehingga masyarakat tidak mengetahui sama sekali kebijakan maupun peraturan daerah yang akan dibuat pemerintah.

Kelima, Salah satu masalah di Kabupaten Bandung Barat adalah mengenai masih rendahnya tingkat pendidikan masyarakat. Hal ini dapat dilihat pada angka partisipasi penduduk untuk sekolah menengah, terutama sekolah menengah atas masih

*Received : 22 Okt 2024**Accepted : 22 Okt 2024**Published : 22 Okt 2024*

rendah. Sehingga sebagian besar penduduk hanya mendapat pendidikan sampai dengan tamat sekolah dasar, bahkan sebagian tidak tamat sekolah dasar. Hal ini menjadi masalah karena dengan tingkat pendidikan yang rendah akan sulit bagi mereka untuk mendapatkan pekerjaan formal dan pada akhirnya akan berimbas pada meningkatnya angka kemiskinan. Selain mengenai tingkat pendidikan masyarakat, aspek lain yang perlu diperhatikan dalam rangka peningkatan kualitas sumber daya manusia.

KESIMPULAN

Terkait dengan kinerja organisasi pemerintah Kabupaten Bandung Barat dalam mewujudkan good governance penulis menyimpulkan bahwa pemerintah Kabupaten Bandung Barat saat ini sudah menunjukkan kinerja yang baik dengan beberapa pencapaian dan prestasi Baik di level regional maupun di level nasional. Selain itu Pemerintah Kabupaten Bandung Barat juga aktif mendorong peningkatan kinerja melalui kepemimpinan yang ditunjukkan oleh kepala daerah saat ini . Adapun faktor-faktor yang menjadi penghambat dalam upaya meningkatkan kinerja organisasi pemerintah Kabupaten Bandung Barat dalam mewujudkan good governance adalah Terbatasnya kualitas serta kuantitas sumber daya aparatur Pemerintah Kabupaten Bandung Barat terutama pada level teknis, Selain itu rendahnya tingkat pendidikan pegawai masih menjadi penghambat dalam meningkatkan kinerja organisasi. Kendala lain yang dihadapi adalah masih kurangnya sarana dan prasarana dalam mewujudkan kinerja organisasi yang baik guna mewujudkan good governance. Sedangkan pada aspek eksternal kendala ditemukan berupa rendahnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah.

Adapun upaya yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Bandung Barat dalam mengatasi kendala yang dihadapi pada peningkatan kinerja organisasi pemerintah dalam mewujudkan good governance adalah dengan memberikan pendidikan dan pelatihan serta pembinaan dan penghargaan kepada aparatur

*Received : 22 Okt 2024**Accepted : 22 Okt 2024**Published : 22 Okt 2024*

Pemerintah Kabupaten Bandung Barat. Selain itu upaya yang dilakukan adalah dengan merumuskan sebuah kebijakan yang nantinya dapat mendorong pada peningkatan kinerja pemerintah dalam mewujudkan good governance .

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, M. (2014). *Manajemen dan Evaluasi Kinerja Karyawan*. (B. R. Hakim, Penyunt.) Sleman, Yogyakarta, Sleman: Aswaja Presindo.
- Agustino, L. (2016). *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Bacal, R. (2001). *Performance Management*. Jakarta: PT.Gramedia Pustaka Utama.
- Dharma, S. (2005). *Manajemen Kinerja* (1 ed.). Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Ghony, M. D., & Almanshur, F. (2012). *Metode Penelitian Kualitatif*. (R. T. Sari, Penyunt.) Jogjakarta, Jawa Tengah, Yogyakarta: Ar-Ruzz Media.
- Hamzah, A. (2021). *Metode Penelitian Kualitatif* (1nd ed.). Malang: Literasi Nusantara.
- Haryono, S. (2018). *Manajemen Kinerja* (1 ed., Vol. 1). (D. Puryanto, Penyunt.) Jakarta Timur, Jakarta, Jakarta Timur: Luxima Metro Media.
- Huseno, T. (2016). *Kinerja Pegawai* (1 ed., Vol. 1). Malang: Media Nusa Creative.
- Kemenpan. (2006). *Model Penyelarasan Desain Pengukuran Kinerja Individu & Organisasi* (SAKIP ed.). Jakarta: Kemenpan.
- LAN & BPKP. (2000). *Akuntabilitas dan Good Governance*. Jakarta: Lembaga Administrasi Negara.
- Mahsum, M. (2009). *Pengukuran Kinerja Sektor Publik*. Yogyakarta: BPFE. Moenek, R., & Suwanda, D. (2021). *Good Governance* (Pengelolaan Keuangan Daerah). Bandung: PT. REMAJA ROSDAKARYA.
- Moleong, L. J. (2014). *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Revisi ed.). Bandung: PT Remaja Rosdakarya Offset.
- Prawirosentono, S. (1999). *Manajemen Sumber Daya Manusia "Kebijakan Kinerja Karyawan"* (1 ed., Vol. 1). Yogyakarta: BBFE.
- Rahadi, D. R. (2010). *Manajemen Kinerja Sumber Daya Manusia* (Vol. 1). Malang: Tunggal Mandiri Publishing.
- Sedarmayanti. (2003). *Good Governance dalam Rangka Otonomi Daerah*. Bandung: PT.Mandar Maju.
- Sedarmayanti. (2012). *Good Governance* (Edisi Revisi ed.). Bandung: Cv.Mandar Manju. Sholeh, C., & Suropto. (2011). *Menilai Kinerja Pemerintahan Daerah*. Bandung: Fokusmedia.
- Sugiyono. (2012). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Sulisworo, D. (2009). *Pengukuran Kinerja*. Yoyakarta, Jawa Tengah: Teknik Industri Universitas Ahmad Dahlan.

*Received : 22 Okt 2024**Accepted : 22 Okt 2024**Published : 22 Okt 2024*

-
- Sundari, S. (2021). *Manajemen Kinerja*. (Dindin, Penyunt.) Bogor: Universitas Pertaanan.
- Suryani, K., & E.H.J, J. (2018). *Kinerja Organisasi*. Sleman: Deepublish. Widodo, J. (2008). *Good Governance*. Surabaya: Insan Cendekia.
- Amanah, S., Larasati, E., & Sundarso. (2017). Analisis Kinerja Kantor Kecamatan Karangsembung Kabupaten Kebumen. *Jurnal Fisip Undip*.
- Riany, R., & Putera, R. E. (2013). Analisis Kinerja Organisasi Pemerintah dalam Memberikan Pelayanan Publik di Kota Pariaman. *MIMBAR*, 29(1), 33-40.
- Hartajunika, G., Sujana, E., & Atmadja, A. T. (2015). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kinerja Organisasi Sektor Publik. *Jurnal Akuntansi Program S-I*, 3(1).
- Latang, A. (2014). Analisis Kinerja Organisasi Pada Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Daerah Provinsi Sulawesi Tengah. *e-Jurnal Katalogis*, II(1), 71- 79.
- Listiani, T. (2011). Manajemen Kinerja, Kinerja Organisasi Serta Implikasinya terhadap Kualitas Pelayanan Organisasi Sektor Publik. *Jurnal Ilmu Administrasi*, VII(3).
- Putri, A. P. (2018). Analisis Kinerja Sektor Publik (PDAM Kabupaten Mempawah) Menggunakan Aspek Keuangan dan Non Keuangan. *Jurnal Audit dan Akuntansi*, 7(2), 61-84.
- Statistics of Bandung Barat. (2016). *Kabupaten Bandung Barat Dalam Angka 2016*. BPS. Bandung Barat: BPS KBB. Dipetik Februari 1, 2021, dari <https://bandungbaratkab.go.id/media/artikel/18/448897a504-bandung-barat-dalam-angka-2016-finale2.pdf>